

**KAPASITAS PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BERSUMBER DANA DESA DI KAMPUNG RAWANG KAO KECAMTAN
LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK TAHUN 2018**

Oleh : Taupiq Gandhi Mahatma

Dosen Pembimbing : Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Capacity is the ability, skills, understanding, attitudes, values, relationships, behavior, motivation, resources and conditions that enable individuals, organizations, networks / sectors, and the broader system to carry out their functions and achieve the development goals that have been set from time to time. In order to increase the professionalism of the village government, it is necessary to pay attention to: the development of the capacity of the village government with the priority of increasing the capacity in public services such as basic community needs, security and ability to deal with disasters, the ability to prepare strategic plans for village economic development, the capacity for village financial management, and sustainable management environment.

This study aims to understand the Government's Capacity in Developing Village Fund-Sourced Infrastructure in Rawang Kao Village, Lubuk Dalam District, Siak Regency in 2018. The research was conducted in Rawang Kao Village, Lubuk Dalam District, Siak Regency. This data collection technique is done by interview and documentation. The method used in this research is descriptive qualitative.

The results of this study indicate that the capacity of the village government in infrastructure development based on village funds can be measured through Morgan's theory in Soepranto, namely, abilities, skills, understanding, attitudes, values, relationships, behavior, motivation, resources and conditions that allow individuals, organizations, networks and systems to more broadly carry out functions. The research conducted can conclude that the capacity of the village government in developing infrastructure sourced from village funds is still not running well in its implementation, there are still many village government officials who do not understand the tasks and functions that have been given. It is felt that the training that should be carried out continuously by the central government plays an important role in increasing the capacity of village government officials. The ability of the village apparatus greatly influences the performance that will be given, thus human resources should be properly selected again so that the village government works optimally and gives optimal results.
Keywords: Capacity, Infrastructure Development, Village Fund

PENDAHULUAN

Era Reformasi yang berdampak pada terjadinya pergeseran paradigma sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang Desentralistik. Otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat sendiri atas pemerataan dan keadilan sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah otonomi daerah masing-masing.

Perubahan sistem pemerintahan tersebut juga berdampak pada tataran pemerintahan kecamatan dan kampung, yaitu kecamatan tidak lagi menjalankan urusan-urusan dekonsentrasi yang merupakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah. Urusan-urusan tersebut sudah menjadi wewenang bagi pemerintah kampung dalam melaksanakan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di berbagai bidang, dengan begitu pemerintahan kampung menjadi kunci dalam menjalankan otonomi daerah.

Administrasi pemerintah memegang peranan penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional yang sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang ditetapkan pemerintah, dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan

pada masyarakat perdesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di perdesaan. Kampung sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa¹.

KERANGKA TEORI

Kapasitas Pemerintah

Menurut Morgan dalam Soeprapto, kapasitas adalah kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.² Menurut Brown dalam Soeprapto mendefinisikan "kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

² Soeprapto, Riyadi (2010:10) *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, Word Bank

tujuan yang dicita-citakan”. Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan.

Pemerintah Kampung

“Perintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata “*government*” kata yang berasal dari suku kata “*to govern*”. Tetapi “perintah” disalin dengan “*to order*” atau “*to command*” dengan lain kata “*to command*” tidak diturunkan dari “*to govern*”.

Dari keempat ciri khas dari kata perintah diatas mempunyai makna/ pengertian yaitu: “keharusan” berarti dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan; adanya “wewenang” berarti menunjukkan syahnya perintah yang diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak syah dan hilanglah kekuatan hukum dari perintah itu. Wewenang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 5) adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. maka kata

“pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara.³ Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Pembangunan Infrastruktur

Secara umum pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan material. Maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi. Untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan maka dibutuhkan adanya stabilitas politik karena stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktifitas negara tersebut setiap

³ Bayu surianingrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 9-10

tahunnya⁴. Pembangunan menekankan pemenuhan pokok dan hak asasi manusia artinya pembangunan berusaha memenuhi empat kebutuhan pokok yaitu kesejahteraan ekonomi (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan identitas (*identity*), dan membebaskan diri dari empat belenggu kekerasan yaitu kemiskinan (*poverty*), kerusakan (*destruction*), tekanan (*repression*) dan aliansi (*alienation*)⁵.

Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan daerah sekitarnya. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga dalam jangka panjang keberadaan infrastruktur harus berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi serta memperhatikan aspek efisiensi dan keadilan.

Keuangan Desa

Menurut Soleh dan Rohmansjah, dana desa atau keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut.⁶ Menurut Muhammad Arif keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Keuangan desa merupakan faktor yang esensial karena dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri dibutuhkan adanya dana atau uang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan teknik wawancara dan dokumentasi berdasarkan teori Morgan dalam Soeprapto kapasitas dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu : Kemampuan, Keterampilan, Pemahaman, Sikap, Nilai-nilai, Hubungan, Perilaku, Motivasi, Sumber Daya dan Kondisi yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan kerja dan sistem untuk lebih luas melaksanakan fungsi.

Rincian Dana Desa yang diterima Kampung Rawang Kao Tahun 2018

No	Penerimaan Dana Desa	Jumlah
1	Tahap Pertama	Rp 411.202.200
2	Tahap Kedua	Rp 192.037.081
Total Anggaran		Rp 603.401.931

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa pada tahun 2018 pemerintah Kampung Rawang Kao telah menerima kucuran dana desa

⁴ Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995)

⁵ Zubaedi, Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),

⁶ Menurut Soleh dan Rohmansjah (2014)

melalui APBN sebesar Rp. 603.401.931 atau enam ratus juta lebih. Dana desa tersebut digunakan penghulu kampung Rawang Kao melalui bidang pelaksanaan pembangunan kampung digunakan untuk membangun konstruksi jaringan air (*drainase*) dan membangun *box culvert* kampung. Mencermati pengelolaan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah kampung Rawang Kao, masih terdapat permasalahan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya petunjuk peraturan untuk mengelola dana tersebut yang belum dapat dipahami oleh aparat pengelola dana desa. Mekanisme penggunaan dana desa belum dilakukan menurut petunjuk teknis yang diatur dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak mencapai hasil yang optimal. Penggunaan dana desa sendiri diperuntukan fokus untuk pelaksanaan pembangunan desa sementara itu masih belum ada untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan kemasyarakatan.

Anggaran desa yang diperoleh oleh pemerintah kampung tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tercapainya hasil yang optimal. Sehingga diperlukan peran perangkat kampung untuk membantu penghulu kampung dalam mengelola dana desa. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan yang fatal karena belum memadainya kompetensi penghulu kampung dan aparat kampung di Kampung Rawang Kao dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam hal

administrasi dan pembangunan infrastruktur bersumber dana desa.

peneliti menjelaskan hasil studi dari Kapasitas Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur bersumber Dana Desa di Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2018. Kapasitas pemerintah tersebut dapat diukur berdasarkan konsep Morgan dalam Soeprapto yaitu : (1. Kemampuan (2. Keterampilan (3. Pemahaman (4. Sikap (5. Nilai-nilai (6. Hubungan (7. Perilaku (8. Motivasi (9. Sumber Daya (10. Kondisi yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan kerja dan sistem untuk lebih luas melaksanakan fungsi.

Kemampuan

Menurut Anggiat M. Sinaga dan Sri Hadiati Kemampuan adalah keefektifan seseorang dalam melakukan segala macam pekerjaan. Kemampuan juga diartikan sebagai sebuah potensi yang ada pada diri seseorang yang bisa diasah dengan beberapa pelatihan.

Fenomena yang ada sekarang bahwa masih terdapat organisasi pemerintah yang belum dapat melaksanakan fungsi pelayanan dengan baik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik masih mewarnai penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Kemampuan kerja yang rendah yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki aparat menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan pada pemerintahan desa.

Tengku Indra Putra, S.STP., M.Si selaku Camat Lubuk Dalam mengatakan bahwa :

“Kemampuan aparatur kampung yang akan kita tingkatkan sebenarnya sudah diberikan melalui bentuk

pelatihan di kecamatan lubuk dalam, dalam hal ini kita berbicara dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018 dimana kita terus berupaya meningkatkan baik itu dengan peningkatkan kemampuan aparatur melalui pelatihan agar terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat hingga meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan baik secara kecamatan maupun dalam tingkat kampung”(wawancara tanggal 15 Agustus 2020)

Sedangkan Parman, SP selaku penghulu kampung Rawang Kao mengatakan bahwa:

“Kalau kita untuk mengelola dana desa sudah membagi tugas kepada staff kampung dengan kemampuan dan ilmu yang mereka miliki, tetapi ada beberapa staff kampung yang mengalami kendala dalam memahami bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan dana desa. Dana desa yang merupakan hal yang sensitif terhadap bagaimana berlangsungnya pembangunan kampung haruslah dilaksanakan oleh staff atau aparat kampung yang memiliki kemampuan yang mumpuni terutama dalam bidang mengelola dana desa. Kurangnya penyuluhan aparat kampung oleh pemerintah pusat menjadikan kemampuan aparat kampung hanya sebatas yang sudah mereka miliki saja, walaupun ada penyuluhan dari pemerintah kecamatan namun tidak dilakukan setiap tahun secara terus-menerus”(wawancara tanggal

15 Agustus 2020)

Keterampilan

Keterampilan menurut Dunette menyatakan bahwa keterampilan ini merupakan pengetahuan yang didapatkan serta dikembangkan dengan melalui latihan atau training serta pengalaman dengan melakukan berbagai tugas. Sedangkan Keterampilan menurut Hari Amirullah Menurut Hari Amirullah, istilah dari kata terampil ini juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau juga tugas.⁷

Salah satu persoalan yang mendasar yang dihadapi kampung adalah sangat minimnya jumlah Sumber Daya Manusia aparturnya. Ditambah lagi, tingkat pengetahuan dari masing-masing aparat pemerintah sangat beragam. Hal yang tampak sepele namun cukup mengganggu adalah kendala kurangnya keterampilan aparatur kampung dalam mengoperasikan komputer. Dampaknya pengelolaan keuangan kampung masih banyak yang dilakukan secara manual dan seringkali menimbulkan persoalan dalam penatausahaan.

Tengku Indra Putra, S.STP.,M.Si selaku Camat Lubuk Dalam mengatakan bahwa :

“Keterampilan tentu saja sangat dibutuhkan di era moedren seperti saat ini, di kampung se lubuk dalam ini memang belum lama menerapkan sistem komputerisasi dalam hal pelaopran penggunaan dana desa, bahkan sebelumnya juga sudah diterapkan walpun belum sepenuhnya digunakan oleh aparatur kampung. Dalam hal ini tentu saja pihak

⁷ Dunette (1976)

kecamatan berperan penting sebagai pemberi masukan dan juga bantuan hanya saja terkadang bantuan seperti pelatihan dari pusat hanya menjadi event liburan aparaturnya kampung apalagi pelatihan hanya berselang beberapa hari ataupun beberapa minggu. Kedepannya kami akan lebih memaksimalkan pemantauan serta gencar dalam memberikan arahan dan pelatihan melalui tenaga ahli yang dimiliki oleh setiap kampung.”(wawancara tanggal 15 Agustus 2020)

Pemahaman

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar. Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat⁸. Dengan kata lain pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Hasil belajar pada pemahaman lebih tinggi satu tingkat dari tipe hasil belajar pengetahuan yang sifatnya hafalan. Karena pada tingkat pemahaman memerlukan kemampuan untuk menangkap makna atau arti dari sebuah konsep.

Pada Pemerintahan Kampung Rawang Kao secara penyusunan peraturan yang ada dilihat belum konsisten. Adanya peraturan yang sering berubah-ubah dari tahun ke

tahun tersebut para aparaturnya merasa kesulitan dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi. Tidak hanya dalam penyusunan dan pelaksanaannya saja tetapi juga terlalu banyaknya peraturan mengenai undang-undang, sehingga para aparaturnya tidak mungkin dapat mempelajari satu persatu undang-undang tersebut.

Bapak Parman, SP Selaku Penghulu Kampung Rawang Kao mengatakan bahwa:

“Jika berbicara tentang apakah aparaturnya kampung disini paham akan tugas dan fungsi tentu saja mereka paham, namun perlu digaris bawahi bahwa memahami tugas dan fungsi butuh waktu dan tentu saja pemahaman dan motivasi dari aparaturnya kampung itu sendiri. Bisa dikatakan kendala di kampung adalah aparaturnya kampung belum sepenuhnya paham akan tugas dan fungsi mereka. Terkait dengan petunjuk teknis penyelenggaraan dana desa sudah dijelaskan perihal pembangunan infrastruktur bersumber dana desa tahun 2018, namun memang banyak terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemerintahan baik itu dalam penggunaan dana desa tersebut” (wawancara tanggal 15 Agustus 2020)

Sikap

Menurut Eagle dan Chaiken dalam buku A. Wawan dan Dewi M. mengemukakan bahwa sikap dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap obyek sikap yang diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif (emosi) dan perilaku.

Dari atas menunjukkan bahwa secara garis besar sikap terdiri dari komponen kognitif (ide yang umumnya berkaitan dengan pembicaraan dan dipelajari), perilaku (cenderung mempengaruhi respon sesuai dan tidak sesuai) dan emosi (menyebabkan respon-respon yang konsisten).

Bapak Suprianto Selaku Kerani Kampung Rawang Kao mengatakan bahwa:

“Sikap dalam pekerjaan kita tentunya sangat di perhatikan oleh masyarakat sekitar, kita bekerja dengan sikap acuh tentunya akan ada gejolak dan akibat yang akan ditimbulkan di masyarakat sehingga kita akan dipandang buruk. Maka dari itu jika berbicara sikap kita tentunya memberikan yang terbaik karenanya kita juga membutuhkan hal yang positif agar pekerjaan kita berjalan dengan baik. Terkait dengan dana desa tentunya kami aparaturnya kampung selalu memberikan rincian dana desa akan dikemakan, karena sebelumnya juga kita telah menyusun dalam musrembangdes bersama warga” (wawancara tanggal 15 Agustus 2020)

Nilai-nilai

Nilai adalah segala sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan, bahwa dalam kehidupan masyarakat nilai merupakan sesuatu untuk memberikan tanggapan atas perilaku, tingkah laku, dan segala

sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat baik secara kelompok maupun individu.

Bapak Parman, SP Selaku Penghulu Kampung Rawang Kao mengatakan bahwa:

“jika berhubungan dengan nilai, tentunya kami juga menilai kinerja aparaturnya bagaimana kinerjanya dalam pemerintahan kampung ini. Jika dikaitkan dalam kinerja aparaturnya kampung dalam pembangunan infrastruktur yang bersumber dana desa, tentunya masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Dari masyarakat sendiri, baik buruknya berbicara tentang kami di desa sudah kami terima. Karena bagaimanapun sebuah sistem tidak ada yang sempurna dan kami paham betul masih banyak kekurangan yang dimiliki aparaturnya kampung disini” (wawancara tanggal 15 Agustus 2020)

Hubungan

Definisi hubungan pemerintah adalah hubungan yang terjadi antara yang diberi perintah dengan pemerintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu dengan yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hubungan pemerintah mengikuti pola sistem pada umumnya, baik dalam bentuk sistem komunikasi maupun siklus.

Tengku Indra Putra, S.STP, M.Si selaku Camat Lubuk Dalam mengatakan bahwa :

“Tentu saja hubungan kami tidak hanya hubungan ke atas saja (kabupaten/kota) DPMD,

kampung, masyarakat dan semua kelembagaan baik itu lembaga kampung maupun masyarakat. Dengan adanya kecamatan saya rasa adalah tempat per-aduan karena disini kami juga tidak menutup kemungkinan melakukan kesalahan ataupun ada kampung yang merasa tidak diperhatikan. Pada dasarnya kami sudah menetapkan visi dan misi yang bertujuan agar kecamatan ini setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dalam skala kecamatan maupun kampung-kampung yang ada dalam lingkup kecamatan ini.” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2020)

Perilaku

Pengertian Perilaku Organisasi menurut Larry L.Cummings dalam Miftah Thoha yaitu suatu cara berpikir, suatu cara untuk memahami persoalan-persoalan dan menjelaskan secara nyata hasil-hasil penemuan berikut tindakan-tindakan pemecahan. Lebih lanjut, pengertian perilaku organisasi menurut Joe Kelly guru besar manajemen pada Sir George Williams University dalam Miftah Thoha mengemukakan bahwa : Perilaku organisasi dapat dirumuskan sebagai suatu sistem studi dari sifat organisasi seperti misalnya: bagaimana organisasi dimulai, tumbuh, dan berkembang, dan bagaimana pengaruhnya terhadap anggota-anggota selain individu, kelompok-kelompok pemilih, organisasi-organisasi lainnya, dan institusi-institusi yang lebih besar.

Bapak Parman, SP Selaku Kerani Kampung Rawang Kao mengatakan bahwa:

“Mengenai perilaku aparatur kampung disini sudah dikatakan profesional dalam

menjalankan tugas dan fungsinya. Bagaimana tidak jika seorang pekerja tidak mendapatkan gaji dalam kurun waktu yang cukup lama tentunya kiat pekerja akan menurun, namun tidak berlaku dengan aparatur kampung disini. Aparatur tetap bekerja dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Namun jika dikatakan pemahaman terkait apa yang dikerjakan mungkin bisa dikatakan masih kurang, dalam pengelolaan dana desa, segala hal kita masih manual. Sehingga masih banyak kekurangan yang dihadapi oleh aparatur kampung.”(wawancara tanggal 15 Agustus 2020)

Motivasi

Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat atau pun minat yang begitu besar di dalam diri, untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya, untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik.

Bapak Suprianto selaku Kerani Kampung Rawang Kao beliau mengatakan :

“Kalau untuk motivasi disini kita berkaitan dengan teknologi, apalagi kita dulu dalam hal urusan kantor penghulu ini masih manual

kan, tapi sekarang seiring berjalannya jaman teknologi pun mulai berkembang pesat, kitapun mau tak mau harus mempelajari kembali ilmu yang cukup untuk mengoperasikannya, yang dulunya masih manual dalam urusan kantor sekarang kita sudah menggunakan laptop sebagai administrasi dan juga tentunya dalam hal pelaporan penggunaan dana desa kantor kampung rawang kao ini.” (wawancara tanggal 15 Agustus 2020)

Sumber Daya

Aparatur pemerintah kampung dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan tugas pemerintahan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang baik sehingga apa yang direncanakan dapat terealisasi dengan maksimal. Aparatur desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat karena merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Disini aparatur membutuhkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kegesitan, proaktif dan inovatif serta mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam usaha pemberian layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Daftar Sumber Daya Manusia di Kampung Rawang Kao Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Putus Sekolah	30
2	Tamat SD	205
3	Tamat SMP	189
4	Tamat SMA	144

5	Tamat Perguruan Tinggi	20
Jumlah		588

Daftar Sumber Daya Alam di Kampung Rawang Kao Tahun 2018

No	Uraian sumber daya alam	Jumlah (hektar)
1	Pertanian/perkebunan kelapa sawit	996
2	Tanah Timbun	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kampung Rawang Kao memiliki jumlah penduduk tamatan SD sebanyak 205, tamatan SMP 189, tamatan SMA 144, tamatan Strata 1 (S-1) 20 dan putus sekolah sebanyak 30. Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia Desa Rawang Kao hampir seluruhnya perkebunan Kelapa Sawit dengan luas 996 Hektar. Dalam hal Sumber Daya yang terjadi di tingkat pemerintahan terendah yaitu desa atau kelurahan masih ditemui kejadian-kejadian menyangkut belum optimalnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga masyarakat semakin percaya dan mau menunjang program-program pemerintah desa. Sekarang ini kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat perlu diadakan perbaikan. Dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas, responsivitas, kesamaan perlakuan/tindak diskriminatif maka pelayanan yang diberikan masih jauh dari yang diharapkan dan masih memiliki berbagai kelemahan.

Bapak Sudarmono selaku masyarakat di kampung rawang kao mengatakan bahwa :

“Masyarakat disini sudah lebih tertarik kepada

pemerintah kampung, sebab jika melihat dahulu beberapa tahun yang lalu bisa dikatakan masyarakat disini memang tidak begitu peduli akan pemerintah kampung. Sekarang dengan adanya penilaian dari masyarakat akan kinerja aparatur pemerintah kampung tentunya menjadi niatan baik akan partisipasi masyarakat lebih berperan dan memikirkan keadaan kampung selain itu tingkat minat pemuda pun untuk terjun langsung menjadi aparatur kampung mungkin akan terlihat meningkat dari pada tahun sebelumnya.”(wawancara 15 Agustus 2020)

Kondisi yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan kerja dan sistem untuk lebih luas menjalankan fungsi.

Kondisi yang dimaksudkan adalah baik itu perasaan maupun tindakan yang akan mempengaruhi individu, organisasi maupun jaringan kerja dan sistem untuk bekerja dan menjalankan fungsinya dengan luas yang dimaksud adalah keluwesan dalam hal ini dalam pekerjaan sehingga target maupun capaian akhir telaksana dengan baik. Para aparatur kampung tidak memperoleh pendidikan dan pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan sebagaimana diberikan oleh Negara kepada Pegawai Negeri Sipil, para perangkat desa hanya memperoleh pembekalan pada awal memangku jabatan mengenai tugas pokok dan fungsi dan tugas-tugas administrasi, tetapi setelah itu tidak memperoleh diklat teknis dan juga tidak ada monitoring dan evaluasi (*monev*), terkadang sebagian perangkat desa baru memperoleh diklat teknis (misalnya

administrasi, perencanaan, keuangan, pendataan dan lain-lain) jika ada proyek diklat dari pemerintah yang datangnya tidak menentu.

Bapak Parman, SP Selaku Penghulu kampung Rawang Kao mengatakan bahwa:

“Kondisi di kampung ini tentu sudah dijelaskan sebelumnya, mulai dari keterlambatan upah, hingga baru adanya pendamping ahli di kampung membuat aparatur pemerintah kampung baru memulai dan memahami akan menjalankan fungsinya. Ya mungkin gejolak yang terjadi dimasyarakat adalah hal yang perlu dikaji ulang oleh kita terkait dengan perumusan prioritas dana desa di kampung kita. Dengan adanya kekurangan tersebut kiranya kinerja maksimal aparatur kampung dalam menjalankan pemerintahan kampung dan juga pemanfaatan dana desa kiranya memang kurang optimal.” (wawancara tanggal 15 Agustus 2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan di Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bagaimana kapasitas pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur bersumber dana desa di Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak 2018 belum optimal. Ini terbukti berdasarkan hasil penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa :

Kemampuan Pemerintah Kampung Rawang Kao masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan,

dikarenakan masih terdapat aparaturnya pemerintah kampung yang masih bingung akan tugas dan fungsinya, hanya sekedar saja dalam melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan kampung. Keterampilan yang dimiliki Aparatur kampung kiranya perlu ditingkatkan lagi guna untuk menjadikan aparaturnya pemerintahan yang kompeten dalam bidang yang dijalankannya. Pemahaman terkait dengan penggunaan dana desa dan pembangunan yang akan di selenggarakan sudah dijelaskan oleh penghulu kampung namun kiranya aparaturnya kampung perlu memahami dengan rinci prioritas yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis untuk dana desa agar terciptanya lingkungan yang optimal dalam perancangan dan juga dalam pengelolaan dana desa. Sikap pemerintah kampung dalam hal menanggapi prioritas yang harus diambil dalam penggunaan dana desa dan bagaimana tindakan yang perlu diambil guna memberikan dampak yang baik bagi keadaan masyarakat terkait penggunaan dana desa tersebut. Kapasitas aparaturnya pemerintah kampung dalam pembangunan infrastruktur berseumber dana desa masih belum berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya, masih banyak aparaturnya desa yang tidak mengerti akan tugas dan fungsi yang terlah diberikan. Pelatihan yang seharusnya dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah pusat dirasa sangat berperan penting dalam peningkatan kapasitas aparaturnya kampung. Kemampuan aparaturnya kampung sangat berpengaruh terhadap kinerja yang akan di berikan, dengan demikian sumber daya manusia seharusnya kembali diseleksi dengan baik agar pemerintahan kampung bekerja dengan maksimal dan memberikan hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiman, Arief.1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*.Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama
- Creswell W Jhon. 2010. *Research Design pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan mixed*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Effrianto, P. *Kiat-Kiat Terhindar Dari Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : Imprint Change Publication
- Eko, Sutoro. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press
- Handayani, Risma. 2014. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan Makassar*.Alauddin University Press
- Kompak. 2017. *Analisa Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta : Bappenas
- Milen, Annel 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas (Terjemahan bebas dari: What Do We Know About Capacity Building)*. Yogyakarta Pembaharuan.
- Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Robert K. Yin. 2008. *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soeprapto, Riyadi, 2010. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*. Word Bank
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta

W Gulo. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Gramedia

Widjaja, Haw. 2014. *Otonomi Desa* . Jakarta : Grafindo Persada

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK07/2016

Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa